



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

LAPORAN

**HASIL MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
QUICK WINS
KEMENDIKBUDRISTEK
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Birokrasi adalah instrumen utama modernisasi, bahkan tingkat kecepatan capaian pembangunan suatu bangsa utamanya ditentukan oleh kinerja birokrasi, sehingga upaya mereformasi birokrasi untuk mampu menjadi organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif adalah suatu keniscayaan. Sehingga tujuan dari dilakukannya reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kemendikbudristek sebagai instansi publik memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi birokrasi bagi dirinya sendiri sesuai dengan arah kebijakan utama reformasi birokrasi nasional, dan salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pelaksanaan program *Quick Wins*. *Quick Wins* merupakan kegiatan yang dapat dikedepankan keunggulannya dari aspek kecepatan, capaian target, dan dampaknya, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan.

Di tahun 2020, berdasarkan berbagai pertimbangan dan *assesment* Tim Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan program-program *Quick Wins* Kemendikbudristek tahun 2020 - 2024. Untuk itu laporan ini kami susun sebagai upaya untuk memberikan gambaran perihal program-program *Quick Wins* Kemendikbudristek mulai dari penetapannya hingga pada capaiannya, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Quick Wins* Kemendikbudristek sampai dengan triwulan IV tahun 2021. Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan *Quick Wins* Kemendikbudristek secara umum.

Jakarta, Desember 2021
Kepala Biro Perencanaan,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Latar Belakang

BAB II Program *Quick Wins* 2021

Program *Quick Wins* Per Eselon I Tahun 2021

BAB III Capaian Program *Quick Wins* 2021

Capaian Program *Quick Wins* Triwulan 1 s.d. 4 Tahun 2021

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi Tindak Lanjut

BAB I

Latar Belakang

Quick Wins atau yang diartikan sebagai program percepatan dalam Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kerangka besar pelaksanaan reformasi birokrasi. *Quick Wins* sering kali dianggap sebagai cerminan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Daerah. *Quick Wins* seolah menjadi wajah dari betapa rumitnya pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang *Quick Wins* atau program percepatan Kemendikbudristek, maka dirasa perlu mengulas secara singkat reformasi birokrasi sebagai payung besar dari pelaksanaan program percepatan.

Sebagai Lembaga publik, kemendikbudristek memiliki kewajiban secara formal dan secara moral untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan tuntutan reformasi yang terus diupayakan hingga saat ini dan terus berproses menjadi lebih baik. Di satu sisi, reformasi birokrasi juga merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk dapat *survive* ditengah-tengah dunia yang semakin mengglobal, tanpa batas dan sangat dinamis. Sehingga reformasi birokrasi merupakan bentuk adaptasi yang terus berproses untuk mampu mengantisipasi menghadapi kompleksitas dan dinamika yang begitu tinggi. Reformasi birokrasi sebagai instrument adaptasi, dari aspek premis dan aspek konsepsinya terus berkembang. Diawali tuntutan untuk menciptakan “*Good Governance*”, kemudian menjadi lebih fokus kepada upaya mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang terukur dengan penerapan “*New Public Management*”, dan terakhir sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, birokrasi diharapkan sudah mampu mewujudkan “*Dynamic Governance*”.

Secara aplikatif, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola. pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Quick Wins adalah suatu kemenangan atau keberhasilan yang cepat. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.

Definisi, Tujuan dan Jenis *Quick Wins* terlihat sebagai berikut.



Quick Wins atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. *Quick Wins* diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan; Memberikan *image* positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi;

Tahapan *Quick Wins*:

- Perumusan: Identifikasi permasalahan, Identifikasi pemangku kepentingan utama, Identifikasi keluaran utama, Identifikasi harapan pemangku kepentingan utama
- Penetapan: Penilaian tingkat pencapaian kinerja saat ini, Peningkatan kinerja, Penyiapan sumber daya, Penetapan *Quick Wins*
- Pelaksanaan: Persiapan, Implementasi, Monev, Pelaporan

Tahapan pelaksanaan *Quick Wins* terlihat seperti gambar berikut di bawah ini.

Tahapan *Quick Wins*



BAB II

Program Quick Wins Kemendikbudristek 2020-2021

Sekretariat Jenderal

1. Platform Digital Pendidikan Nasional



Platform Digital Pendidikan Nasional merupakan sebuah wadah program yang mengkombinasikan antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengesekusi rencana kerja pembangunan pendidikan nasional. *Platform* pendidikan nasional mencakup *platform* Sumber Daya Sekolah, *Platform* Kurikulum, *Platform* Guru Penggerak, dan *Platform* Persiapan Karir.

Platform ini diharapkan ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan adanya akses peserta didik untuk masuk sekolah, kualitas pembelajaran di satuan Pendidikan dan pemerataan pembangunan pendidikan di wilayah NKRI. *Platform Digital* ini bertujuan untuk memberikan akses bagi pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik di satuan pendidikan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan, mengetahui tolok ukur proses pembelajaran, mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang dapat mempengaruhi pembelajaran dan mewujudkan tata kelola sekolah/satuan pendidikan yang akurat dan akuntabel.

Program ini juga memiliki output utama *Quick Wins* Sistem Aplikasi “*Super App*” agar para pemangku kepentingan bisa mudah dalam mengakses proses-proses pembelajaran di satuan pendidikan dan bisa memberikan masukan langsung kepada satuan pendidikan dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya.

2. Otomatisasi Manajemen Perkantoran

Otomatisasi Manajemen Perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan pesan, dokumen. Salah satunya yaitu Pengintegrasian Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dan Sistem Pengelolaan Arsip dan Dokumen (SPAD).



Otomatisasi Manajemen Perkantoran di lingkungan Kemendikbudristek juga diperlukan adanya pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik untuk mendorong keterpaduan dan pemanfaatan naskah dinas sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dari aplikasi ini untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kemendikbudristek meliputi aplikasi SINDE dan SPAD. Aplikasi ini pun memberikan manfaat kepada para pegawai agar lebih efektif dan efisien.

3. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan (Ekspansi SIPLah).



Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian dilakukan oleh UKPBJ Kemendikbudristek yang berada pada Biro Umum dan PBJ. UKPBJ antara lain melakukan fungsi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, dan pelayanan informasi PBJ pemerintah kepada masyarakat luas.

LKPP memberikan diskresi tentang tata Kelola PBJ pada satuan Pendidikan dari perpres 16/2018 tentang PBJ Pemerintah kepada Kemendikbudristek, dalam hal ini dilaksanakan oleh UKPBJ Kemendikbudristek. Tindaklanjut dari program ini yaitu melakukan pemetaan ruang lingkup tugas dan fungsi. Tata Kelola pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

Tujuan dari program ini pun diharapkan bisa Memberikan pedoman dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ada beberapa jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata Kelola PBJ Satdik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penerima yang mendapatkan manfaat yaitu Satuan Pendidikan dapat melakukan pengadaan untuk memperoleh barang/jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Layanan Pembiayaan Pendidikan Satu Pintu

Layanan Pembiayaan Pendidikan yang terdiri dari Program Indonesia Pintar (Dikdasmen dan Dikti/KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan dan Tunjangan Profesi Guru akan dikemas dalam satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mahasiswa, satuan pendidikan, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



Tindaklanjut yang akan dilakukan yaitu Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mahasiswa, satuan pendidikan, perguruan tinggi dan masyarakat yang semula mendapatkan informasi terkait pembiayaan pendidikan dari berbagai laman web, menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi terintegrasi sehingga lebih praktis dalam mendapatkan informasi.

Tujuan dari program ini agar meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas proses pembiayaan dan *output* utama yang dilakukan sistem informasi terintegrasi layanan pembiayaan Pendidikan. Manfaat yang didapatkan oleh siswa atau mahasiswa agar lebih mudah mengakses informasi terkait pembiayaan pendidikan menjadi lebih praktis dan efektif.

Ditjen Pauddasmen

1. Sekolah Penggerak



Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan mutu hasil belajar siswa dengan meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Guru dan kepala sekolah akan didampingi secara intensif hingga perubahan positif terjadi dan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan fokus kepada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non-kognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program ini pun akan meningkatkan untuk Koordinasi dan kolaborasi peningkatan mutu pendidikan antara pusat dan daerah lemah yang bertujuan untuk bertransformasi sistem peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi dan pembangunan paradigma pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada potensi individual peserta didik. *Output* utama kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan Merdeka Belajar.

Adapun salah satu murid penerima manfaat yang mendapatkan layanan pendidikan yang menyenangkan, berkualitas dan berkesempatan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Salah satu contoh lain dari Kepala Sekolah yang mendapatkan manfaat pendampingan secara kolaboratif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam melaksanakan program sekolah penggerak dan selain dari lingkungan sekolah Pemerintah Daerah pun ikut serta mendapatkan manfaat pendampingan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan program sekolah penggerak sehingga dapat meningkatkan kinerja pendidikan daerah menjadi lebih efisien.

Ditjen GTK

1. Pendidikan Guru Penggerak

Pendidikan Guru Penggerak adalah pendidikan untuk transformasi dan perubahan *mainset* tentang merdeka belajar. Pendidikan dengan fokus pada perubahan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pendidikan untuk menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.



Beragam cara telah ditempuh pemerintah dalam menangani persoalan kualitas guru. Karena kualitas pendidikan hanya bisa dijawab oleh kualitas guru. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh kemendikbudristek melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, seperti pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB),

Pendidikan Guru Pembelajar (PGP), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) sedangkan untuk melihat kualitas guru, pemerintah tahun 2012 dan tahun 2015 melakukan uji kompetensi guru. Hasil uji kompetensi tahun 2012 rata-rata 42,25, sedangkan tahun 2015 sebesar rata-rata 56,69 artikan kompetensi guru secara nasional masih rendah.

Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489. Skor rata-rata hasil studi Pisa masih jauh dibawah. Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara.

Terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbudristek dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan dan konten pedagogi. Guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan dipelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Pengembangan kompetensi guru berhenti setelah pelatihan selesai menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan.



Tujuan dari Program Sekolah Penggerak agar mengembangkan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya, mengembangkan para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru dan memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan/program.

Program Guru Penggerak memiliki 5 *Output* utama yang terdiri dari Guru Mandiri, Berpihak pada Murid, Manajemen Pembelajaran, Inovasi Pengembangan Sekolah, dan Sesuai Kode Etik. Adapun beberapa tanggapan salah satu contoh penerima manfaatnya seperti Peserta didik/Murid yang merasakan terbangunnya rasa nyaman dan bahagia peserta didik berada di lingkungan satuan Pendidikan.

Selanjutnya dari Pendidik/Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pun merasakan terbukanya kesempatan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin Satuan Pendidikan, terwujudnya lingkungan fisik dan budaya satuan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik dan bergeraknya komunitas belajar diwilayahnya secara berkelanjutan sebagai tempat diskusi dan simulasi agar guru dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan potensi tahap perkembangan peserta didik.

Ditjen Pendidikan Tinggi

1. Kampus Merdeka

Program Studi Melakukan Kerjasama Kurikulum dengan Dunia Industri/ Dunia Usaha/ PT QS *Rank* 100 dan Program Studi menjadi *Model Center of Excellence* (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Program studi melakukan reorientasi kurikulum serta melaksanakan kerja sama dengan mitra yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dalam hal pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi sehingga nantinya dapat menjadi model atau contoh bagi prodi lainnya.



Tujuan program studi melakukan reorientasi kurikulum yang mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka serta melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka sehingga dapat menjadi model atau contoh bagi prodi lainnya. *Output* utama dari Program studi memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi.

Manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa dapat memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra, sehingga semakin banyak mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi.

2. Kedaireka Kampus Merdeka



Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melakukan kerja sama dengan pihak Dunia Industri dan Dunia Usaha. Kerja sama dilakukan dalam bidang penelitian, pelayanan ke industri dan masyarakat, pembuatan *startup* dan pusat penelitian (*research center*).

Permasalahan dari program ini minimnya kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak dunia industri dan dunia usaha dikarenakan belum adanya medium komunikasi diantara dua pemangku kepentingan. Solusi berupa rekacipta yang lahir dari perguruan tinggi tidak dimanfaatkan oleh dunia industri dan dunia usaha, dikarenakan tidak bertemunya *problem statement* dari pihak industri dengan *problem solver* dari pihak perguruan tinggi.

Program kedaireka merdeka bertujuan membuka akses yang adil kepada seluruh perguruan tinggi dan dunia industri dan dunia usaha untuk membangun kolaborasi melalui *platform online* kedaireka. Akses kerja sama yang adil ini diharapkan dapat menggerakkan potensi semua perguruan tinggi untuk membuat rekacipta terbaik yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha.

Perguruan tinggi memiliki program inovasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat melalui peninjauan dan kesepakatan kerja sama dalam *Platform* Kedaireka.id dan mendapatkan dana padanan melalui skema *matching fund*.

Manfaat yang didapatkan oleh perguruan tinggi akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh pihak industri ataupun masyarakat dan Dunia Industri dan Dunia Usaha akan memiliki kesempatan mendapatkan solusi terbaik dari seluruh kampus yang ada di Indonesia.

3. Pengembangan Talenta *Digital*



Program Pengembangan Talenta *Digital* untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang memiliki Talenta *Digital*, sehingga tersedianya *pool* talenta *digital* Indonesia. Pengembangan Talenta *Digital* ini melalui dua program yaitu Program Bangkit dan Program AI Consortium.

Kebutuhan Indonesia terhadap 9.000.000 talenta digital pada tahun 2035 (600.000 per-tahun) untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital di mana Indonesia perlu mengejar ketertinggalan *World Digital Competitiveness* (Amanat Presiden).

Tujuan dari program ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti *Micro Credentials* yang terdiri dari *Artificial Intelligence*, *Data Science*, *Machine Learning with Tensorflow*, *Programming with Android Learning*, *Cloud Computing with Google Compute Engine Learning*, sehingga lulusan yang telah mengikuti *Micro Credentials* ini menjadi bagian dari *pool* talenta *digital* untuk kebutuhan transformasi *digital* Indonesia.

Mahasiswa yang mendapatkan sertifikat micro credentials yaitu *Artificial Intelligence*, *Data Science*, *Machine Learning*, *Programming* dan *Cloud Computing*. Mahasiswa/Perguruan Tinggi yang mendapatkan sertifikat tersebut pun mendapatkan manfaatnya seperti, Perguruan tinggi memiliki lulusan-lulusan yang memiliki sertifikat *micro credentials* dan lulusan yang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, Dunia Industri dan Dunia Usaha mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Dan Pemerintah memiliki *pool* talenta *digital* untuk memenuhi kebutuhan transformasi *digital* yang telah dicanangkan.

Ditjen Pendidikan Vokasi

1. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan



SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

Target akhir dari program ini adalah menjadikan SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan, peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Capaian program tersebut mencapai 470 SMK bertransformasi menjadi SMK PK. Secara umum, program SMK PK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Secara khusus, program SMK PK bertujuan untuk Memperkuat kemitraan dengan Pemda dalam pendampingan SMK PK, Memperkuat SDM Sekolah, Meningkatkan *soft* dan *hardskill* SDM dan Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha.

Manfaat yang dirasakan mulai dari Dir. SMK, Pemda, SMK, Guru/Kepala Sekolah, Siswa dan DUDIKA, Memiliki SMK yang menjadi Pusat keunggulan (penggerak sekolah) lain dan Meningkatkan mutu sekolah, Guru dan juga siswa SMK.

2. Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi

Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah salah satu program pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek. Program ini bersifat kompetitif yang berbasis pada usulan program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.

Rancangan pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan vokasi dan Profesi bertujuan untuk menghasilkan, Pengembangan kurikulum proses pembelajaran yang dikembangkan dan didukung oleh industri dan dunia kerja, Meningkatkan kemampuan SDM Program Studi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam mempersiapkan pembelajaran dan lulusan dengan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, Meningkatkan dan memantapkan proses pembelajaran program studi Pendidikan Tinggi Vokasi melalui *Teaching Factory / Teaching Industry*.



3. Link and Match Pendidikan Kecakapan



Link and match Pendidikan Kecakapan adalah penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Kurikulum dan sistem pendidikan terutama pendidikan tinggi di Indonesia sudah saatnya sesuai dengan kebutuhan kerja (*link and match*). Pasalnya, sampai saat ini lulusan Pendidikan Tinggi belum menjadi jaminan bisa memasuki pasar kerja dan dunia industri. Pada hakikatnya konsep *link and match* dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan relevansi Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Program ini memiliki tujuan diantaranya, Meningkatkan daya saing SDM usia produktif, Meningkatkan kualitas Kerjasama berstandar industri dengan dunia kerja, dan Mencetak wirausaha baru. Manfaat atau *impact* yang didapatkan dari *link and match* bias mewujudkan SDM yang unggul, Indonesia Maju seiring dengan Vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Ditjen Kebudayaan

1. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Museum

Museum dan Cagar Budaya menjadi bagian penting dari semesta *compendium* pengetahuan tradisional bangsa ini, tempat koleksi warisan budaya benda dan tak benda dikumpulkan dan dipamerkan. Museum Nasional, sebagai Museum terbesar di Asia Tenggara, mempunyai posisi yang strategis dalam ekosistem pemajuan kebudayaan. Namun sayang, upaya pengembangan Museum Nasional terkendala keterbatasan operasional dan administratif terkait dengan status dan tupoksinya yang sekarang, sebagai satker APBN biasa di bawah lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Dalam Periode waktu lima tahun ke belakang Museum Nasional memiliki kinerja pendapatan museum yang cukup stabil. Hal ini tentunya memberikan bukti tersendiri atas kematangan kinerja keuangan dan layanan dari Museum Nasional.

Sebagai satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Museum Nasional akan menjalankan perannya yang pada tiga fokus utama, yaitu Pengelolaan Koleksi Nasional, Pengelolaan *Venue* Budaya dan Pengembangan Jasa Layanan.

Masalah yang akan diselesaikan dengan cara meliputi, Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum bekerja dengan logika serapan anggaran, Kerjasama internasional dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum masih rendah, Minimnya inovasi layanan dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum, Kualitas *event* yang rendah

karena minimnya pelibatan tenaga profesional, Rendahnya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan segala potensi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Museum Nasional, serta untuk mendorong profesionalitas Museum Nasional hingga mampu bersaing dengan museum-museum lain di tingkat dunia dan terselenggaranya Badan Layanan Umum (BLU) Museum.

Manfaat yang didapatkan dari program ini tersedianya layanan yang handal untuk diakses dengan cepat dan mudah, serta dapat dimanfaatkan tanpa kendala yang berarti dan tersedianya layanan yang mudah dimengerti, dengan sedapat mungkin pengguna dari semua kalangan dapat menggunakan layanan tanpa panduan manual (tatap muka).

2. Fasilitasi Bidang Kebudayaan



Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tidak dapat dibendung apalagi ditolak. Selain memberi kemudahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berimplikasi pada kebudayaan. Kemajuan teknologi informasi misalnya, memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang begitu cepat tanpa harus terjadi pertemuan fisik. Dengan teknologi informasi kita

dapat mempromosikan kebudayaan yang kita miliki tanpa hambatan ruang dan waktu, tetapi masih ada kendala untuk *Platform* penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan belum terlaksana secara baik.

Tujuan fasilitasi bidang kebudayaan agar terwujudnya *Platform* Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) sebagai bantuan langsung ke pelaku budaya yang dikelola secara profesional dan melibatkan dewan kurator independen dari para pemangku kepentingan.

Adanya *output* utama untuk terwujudnya *platform* penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Manfaat yang didapatkan pun terselenggaranya kegiatan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pelaku budaya.

3. Penetapan Jalur Rempah

Indonesia adalah negeri rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di kepulauan Indonesia telah menarik minat suku-suku dan bangsa-bangsa untuk datang dan berniaga dengan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu interaksi Indonesia dengan dunia internasional telah dimulai berabad-abad silam sejak dimulainya perdagangan rempah-rempah. Perdagangan di Nusantara adalah tempat terjadinya silang budaya antara masyarakat lokal dengan para pedagang dari berbagai negara.



Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, diantaranya yaitu selama ini Jalur Rempah masih dianggap sebagai *subordinate* dari Jalur Sutera Maritim (*Maritime Silk Road*) dan Jalur Rempah belum secara serius direkonstruksi dan direvitalisasi sehingga mendapat pengakuan tersendiri dari UNESCO sebagai Warisan Dunia.

Tujuan yang diharapkan dari program ini yaitu Mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*) untuk memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus menegaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Mengembangkan *platform* budaya bersama untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia, dan memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau, dan bangsa, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Jalur Rempah untuk pembangunan berkelanjutan. *Output* yang dituju untuk program ini mendapatkan pengakuan jalur rempah sebagai Warisan budaya Dunia.

Dalam program ini memberikan banyak manfaat yang diantaranya, Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional melalui penguatan diplomasi budaya Indonesia, Menguatnya ketahanan budaya, Meningkatnya kapasitas budayawan dan seniman Indonesia, Berkembangnya sektor ekonomi berbasis budaya (pariwisata, gastronomi, perkebunan, kesehatan, kecantikan, *fashion*, seni, dll).

Inspektorat Jenderal

1. Pengawasan Berbasis TIK



Pengembangan sistem terpadu TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Itjen Kemendikbudristek yang meliputi 3 unsur utama yaitu Sistem Informasi Pengawasan, Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha, dan Sistem Informasi dan Edukasi Pengawasan. Tetapi ada beberapa masalah yang harus diselesaikan yang diantaranya yaitu, Pengembangan sistem TIK Itjen yang belum terpadu, Infrastruktur TIK Itjen yang belum memiliki rencana kebutuhan kapasitas (*capacity planning*) dan Tata kelola informasi Itjen yang belum optimal.

Dibalik adanya beberapa masalah, program ini juga memiliki tujuan hasil pengawasan Itjen mencapai standar IACM dan *output* utama yang dihasilkan adalah Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Internal Berbasis TIK yang handal.

Manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan dari program ini adalah, Sistem TIK Itjen mendukung pengendalian dan pengawasan lebih berkualitas dan Memudahkan akses publik dalam berpartisipasi menunjang peningkatan kualitas pendidikan.

BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

1. Asesmen Diagnosis

Asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin, pada awal ketika guru akan memperkenalkan. Sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester (setiap dua minggu/ bulan/ triwulan/ semester). Masalah yang harus dihadapi dalam program ini yaitu penguatan terhadap prinsip “*teaching at the right level*” (pembelajaran sesuai dengan tingkat).



Asesmen diagnosis memiliki tujuan mendiagnosis kemampuan siswa di awal dan di akhir pembelajaran sehingga terpetakan hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa. Guru diharapkan menggunakan informasi tersebut untuk menyusun strategi pembelajaran dan termanfaatkannya hasil Asesmen Diagnosis oleh Guru sebagai dasar desain pembelajaran pada sebagian besar Satuan Pendidikan.

Hasil dari program ini mendapatkan manfaat bagi penerimanya dengan Asesmen diagnosis memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap siswa serta mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kompetensinya sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa.

2. Reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah



Akreditasi satuan pendidikan merupakan salah satu bagian penting transformasi pendidikan menyeluruh. Kombinasi proses perpanjangan status akreditasi secara otomatis dan reakreditasi manual dengan kunjungan sekolah dan Perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme Sistem Monitoring Sekolah Terakreditasi (Dashboard).

Masalah yang dihadapi yaitu, UU Sisdiknas mewajibkan akreditasi bagian dari sistem penjaminan mutu (*quality assurance*), implikasinya perlu diperjelas, Perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional dan terakhir Problematika manajemen akreditasi sudah berjalan 20 tahun, tetapi masih banyak tunggakan (*backlog*) sekolah belum pernah diakreditasi dan/atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku.

Tujuan dari program ini agar Reformasi proses manajemen agar akreditasi lebih efisien & efektif, tanpa *backlog*, Mengembangkan Instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah dan Memperkuat rekomendasi agar tindak-lanjut lebih konkrit dan efektif.

Penerima yang didapatkan yaitu Tata Kelola (proses bisnis) Akreditasi Sekolah/Madrasah yang lebih efisien dan efektif, Penetapan instrumen akreditasi baru yang berbasis kinerja (*Performance*) dan Pengembangan dashboard monitoring system. Hasil yang didapatkan mendapatkan manfaat Pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah dapat dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel dan akurat.

3. Rumah Peradaban

Rumah Peradaban merupakan jembatan penghubung masyarakat dengan lembaga riset agar mudah mengakses berbagai informasi kesejarahan serta kearifan budaya leluhur bangsa Indonesia di masa lampau. Melalui semboyan “Mengungkap, Memaknai, Mencintai”, Rumah Peradaban menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi dan kesejarahan untuk mewujudkan insan bangsa yang berkarakter dan berkeindonesiaan.



Tetapi masih ada masalah yang harus ditindak lanjuti karena terbatasnya akses masyarakat kepada informasi hasil penelitian arkeologi dan dibalik masalah tersebut program ini memiliki tujuan terlaksananya kegiatan yang akuntabel dan tepat sasaran. Penerima yang mendapatkan dari program ini, diantaranya, Destinasi Pendidikan, Alat Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan. Manfaat pun yang didapatkan dari program ini bisa mengakses informasi kesejarahan, Masyarakat yang mengapresiasi tinggalan arkeologi dan informasi kesejarahan dan Masyarakat yang merasakan manfaat dari penelitian arkeologi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1. UKBI Adaptif



UKBI
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

UKBI Adaptif adalah sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang dapat menguji kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia mulai dari tingkat kemahiran terendah hingga tertinggi dan desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji.

Ada beberapa kendala yang meliputi, Kendala jarak dan waktu di masa pandemi, Karakteristik peserta uji yang sangat bervariasi, Penerbitan sertifikat yang membutuhkan waktu lama. Di sisi lain adanya permasalahan, program ini memiliki tujuan yang menguji kemahiran berbahasa peserta uji berbagai kalangan secara tepat, efektif, efisien, dan presisi.

Output yang dihasilkan dari program ini menghasilkan Instrumen Uji Kemahiran Berbahas dan mendapatkan manfaat untuk penerimanya yang merasakan meningkatkan mutu kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.

2. Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3-M dalam 78 Bahasa Daerah



Penerjemahan pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M ke dalam bahasa daerah dominan di 34 provinsi dalam bentuk buku dan video, tetapi masih adanya masyarakat yang belum memahami dengan baik pedoman protokol kesehatan dalam Bahasa Indonesia. Dalam adanya program ini membantu Menerjemahkan pedoman protokol kesehatan 3-M ke dalam 78 bahasa daerah.

Hasil dari program ini agar masyarakat bisa memahami pedoman yaitu membuat buku dan video pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M dalam 78 bahasa daerah. Manfaat yang didapatkan dari program ini bisa mendapatkan apresiasi Tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M.

BAB III

Capaian Pelaksanaan Program *Quick Wins* Kemendikbudristek Sampai dengan Triwulan IV TA 2021

Sekretariat Jenderal

1. *Platform Digital Pendidikan Nasional*

Program *Platform Digital Pendidikan Nasional* Tahun 2021, Progres capaian: dari target 6 indikator output, ada 4 yang realisasi melebihi target dan 2 yang tidak tercapai sesuai target. Validasi secara akumulatif hingga Desember 2021 mencapai 90,5%. Jumlah sekolah yang terdaftar pada Dapodik hingga Desember 2021 sebanyak 428.743, sedangkan jumlah sekolah yang telah melakukan transaksi pada SipLah adalah sebanyak 129.764, sehingga diperoleh persentase sekolah yang telah melakukan transaksi pada marketplace SipLah sebesar 30,27%.

Jumlah sekolah yang terdaftar pada Dapodik hingga Desember 2021 sebanyak 428.743, sedangkan jumlah sekolah yang telah melakukan transaksi pada SipLah adalah sebanyak 129.764, sehingga diperoleh persentase sekolah yang telah melakukan transaksi pada marketplace SipLah sebesar 30,27%. Jumlah akumulasi telah tercapai sebesar 92,38%, hampir mendekati target yang telah ditentukan. Jumlah guru dan siswa yang terdaftar sudah memenuhi target.

Permasalahan dan kendala: Kendala pada Dikti terkait dengan sarana dan prasarana dan proses pembelajaran dalam penyamaan kode referensi dan struktur database, masih ada keterbatasan sistem dan data dari dapobud dan dapubas yang belum dapat memenuhi seluruh entitas data, belum adanya regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan data di lingkungan Pusdatin maupun di Ditjen Kebudayaan serta Badan pembinaan dan pengembangan Bahasa. Harga di SipLAH lebih mahal dibanding di marketplace lain, Kendala yang dihadapi adalah penguasaan IT peserta serta sinyal internet. Belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana TIK, tidak meratanya kompetensi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital ke dalam pedagogis, sulitnya perizinan produksi yang mendukung Program Belajar dari Rumah (BDR) di masa PSBB. Ada beberapa fitur yang belum menerapkan *single sign on* seperti kelas maya sehingga dalam proses perhitungan pengguna membutuhkan penarikan data kembali dari fitur yang belum menerapkan *single sign on* tersebut.

Rekomendasi dan tindak lanjut: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020 - 2024, ada 6 indikator output yang ditarget selama 5 tahun periode tersebut, sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilaksanakan lagi. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini:

Output Utama/Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Sistem aplikasi “Super App”							
1	Persentase pengintegrasian satu data pendidikan dan kebudayaan.	100,00%	90,50%	91,00%	8.056.308.000	8.011.720.000	99,45%
2	Persentase belanja sekolah melalui online <i>marketplace</i> kecuali 3T (<i>Paltform</i> Sumber Daya Sekolah).	30,00%	30,27%	101,00%	15.580.283.000	14.535.227.000	93,29%
3	Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital (<i>Platform</i> Guru Penggerak).	40.000	41.948	105,00%	42.519.466.000	40.806.934.532	95,97%
4	Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan <i>platform toolkit</i> pembelajaran (<i>Platform</i> Kurikulum).	408.323	1.172.298	287,00%	19.798.946.000	18.289.401.191	92,38%
5	Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> persiapan karier.	299.290	412.674	138,00%	73.037.330.000	71.159.771.350	97,43%
6	Pengembangan dan Pemanfaatan Portal Rumah Belajar.	989.000	989.703	100,00%	1.004.060.000	1.044.056.980	100,00%

2. Otomatisasi Manajemen Perkantoran

Program Otomatisasi Manajemen Perkantoran Tahun 2021, Progres capaian: dari target 5 indikator output, ada 3 yang realisasi sesuai target, 1 yang tidak tercapai sesuai target, dan 1 dalam proses koordinasi dengan unit terkait. 5 tahap penciptaan arsip sudah terfasilitasi melalui menu surat masuk, surat keluar, draf surat, disposisi masuk, disposisi keluar, informasi masuk, informasi keluar. Seluruh data surat dan lampiran dari SINDE dapat ditampilkan di SPAD melalui API. Unit Kerja di luar PTN dan LLDIKTI (74%) telah tersosialisasikan proses bisnis pemberkasan arsip. Sudah tersedia menu automasi 3 instrumen kearsipan (KA, JRA, dan SKKAD) pada SPAD. sudah berkoordinasi antara tim JDIH dengan tim SPAD dalam penyerahan API.

Permasalahan dan kendala: Sosialisasi belum dilakukan untuk unit di PTN karena berdasarkan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019, pembinaan PTN tidak berada di bawah koordinasi Kemendikbud, Pembinaan secara daring akibat pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Belum ada pengesahan draf rancangan penyesuaian peraturan kearsipan yang mengatur Klasifikasi Arsip, JRA, dan SKKAD.

Rekomendasi dan tindak lanjut: dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sosialisasi ke kepada unit di PTN karena sudah kejelasan status PTN di bawah koordinasi dan/atau pembinaan Kemendikbudristek. Melakukan koordinasi secara intensif dengan biro hukum dan biro ortala untuk mempercepat pengesahan draf rancangan permendikbudristek tentang draf rancangan penyesuaian peraturan kearsipan yang mengatur Klasifikasi Arsip, JRA, dan SKKAD. Berdasarkan target yang

termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024, sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilaksanakan lagi ada 3 indikator output yaitu nota dinas pada SINDE terintegrasi ke SPAD, pemberkasan arsip dilakukan melalui SPAD, dan terintegrasinya SPAD dengan SRIKANDI. Sedangkan satu indikator output terIntegrasinya SINDE-SPAD dengan Sistem lainnya dilingkungan Setjen Kemendikbud targetnya hanya di Tahun 2021 sehingga untuk tahun selanjutnya tidak perlu dilaksanakan lagi. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Terintegrasinya aplikasi SINDE dan SPAD							
1	Nota Dinas tercipta melalui SINDE (target hanya di tahun 2020)	Target hanya di tahun 2020: Digunakan-nya TTE pada SINDE	100%	100,00%	11.988.000.000	11.985.000.000	100%
2	Nota Dinas pada SINDE terintegrasi ke SPAD	Pada Aplikasi SPAD telah dapat menampilkan informasi nota dinas dari SINDE	100%	100,00%			
3	Pemberkasan Arsip dilakukan melalui SPAD	Tersosialisasikannya proses bisnis pemberkasan Arsip melalui SPAD kepada pengguna di Satker	202 dari 338 Unit Kerja	74,00%			
4	Terintegrasinya SPAD dengan SRIKANDI	Terpetakannya substansi kearsipan yang tidak/dapat diintegrasikan dengan SRIKANDI	100%	100,00%			
5	TerIntegrasinya SINDE-SPAD dengan Sistem lainnya dilingkungan Setjen Kemendikbud	Tersedia-nya webservice API JDIH (Biro Hukum) untuk penarikan data dokumen peraturan ke SPAD	100%	100,00%			

Untuk memastikan SINDE dapat diterapkan secara optimal oleh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek, maka dilakukan evaluasi secara berkala. Metode evaluasi terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan rencana strategis Kemendikbudristek. Evaluasi dilakukan dengan melihat keaktifan seluruh pengguna dalam satu unit kerja serta melihat ketertiban penginputan surat masuk dan pengambilan nonor surat keluar. Hingga semester 3 hasil evaluasi penerapan sinde pada unit utama adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal : 73,51 %
- Ditjen Paudnasmen : 90,96 %
- Ditjen Pendidikan Tinggi : 45,95 %
- Inspektorat Jenderal : 62,30 %
- Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan : 70,78 %
- Badan Bahasa : 83,71%

- Ditjen Guru Tenaga Kependidikan : 57,12 %
- Ditjen Kebudayaan : 79,56 %
- Ditjen Pendidikan Vokasi : 68,08 %

Hal yang dirasakan penerima manfaat dari program ini adalah dapat meningkatkan komunikasi sehingga menghasilkan keputusan yang lebih dan cepat, selain itu program ini hanya memerlukan sedikit tempat untuk penyimpanan data para pegawai.

3. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan (Ekspansi SIPLah).

Program Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan (Ekspansi SIPLah) Tahun 2021. Progres capaian: dari target 2 indikator output, realisasi pelaksanaan sesuai target. Permasalahan dan kendala: Pindah Ke Pusdatin. Rekomendasi dan tindak lanjut: Pindah Ke Pusdatin, adanya perpindahan penanggungjawab SIPLah dari Biro Umum ke Pusdatin.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024, kedua indikator output tersebut menjadi target 2020-2024, sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilaksanakan lagi 2 indikator output tersebut. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata Kelola PBJ Satdik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku							
1	Persentase jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata kelola PBJ Satdik sesuai peraturan.	45%	93,31%	207,35%	19.754	18.521	94,00
2	Persentase jumlah transaksi satuan pendidikan yang sudah sesuai tata Kelola PBJ Satdik dibandingkan dengan total anggaran PBJ pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia.Sumber Daya Sekolah).	45%	55,52%	123,38%	19.754	18.521	94,00

4. Layanan Pembiayaan Pendidikan Satu Pintu

Program Layanan Pembiayaan Pendidikan Satu Pintu Tahun 2021. Progres capaian: dari 6 indikator output ada 2 yang sudah disusun, ada 1 sedang dikerjakan, dan 2 yang belum disusun. Disusun berdasarkan kebutuhan internal Puslapdik dalam pelayanan publik. Permasalahan dan kendala: Pengadaan infrastruktur TI berupa server tidak mendapatkan persetujuan dari Kemkominfo (tidak lolos *clearance*), Masih Dalam Proses Penyepakatan Teknis Pertukaran Data (*Data Interchange*). Rekomendasi dan tindak lanjut: Mengidentifikasi Kembali bisnis proses dari semua program untuk mendapatkan komponen data yang diperlukan.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 7 indikator output. Target di tahun 2021 ada 6 indikator output sehingga untuk tahun selanjutnya tidak perlu dilaksanakan lagi, sedangkan 1 indikator output lainnya targetnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perkembangan pelaksanaan setiap indikator output terlihat pada tabel di bawah ini. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Sistem informasi terintegrasi layanan pembiayaan Pendidikan							
1	Dokumen Perencanaan	100%	sudah disusun	100,00%	tidak ada alokasi	Tersusun dalam bentuk KAK	-
2	Dokumen teknis spesifikasi kebutuhan sistem informasi	100%	sudah disusun	100,00%	teralokasi fase 1 (Rp115.000.000,-) fase 2 (Rp175.000.000,-)	fase 1 sudah dibayarkan ke pengembang	100,00% (Fase I)
3	Dokumen teknis perancangan sistem informasi	100%	sudah disusun	100,00%			
4	Source Code aplikasi	30% (fase 1)	Proses Pengerjaan	30% (fase 1)			
5	Skenario uji coba dan laporan hasil uji coba	100%	Proses Pengerjaan	30%			
6	Paparan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya	100%	Proses Pengerjaan	20%	tidak ada alokasi	-	-
7	Dokumen teknis rancangan penyempurnaan (target di tahun 2022)	100%	Proses Pengerjaan	0%	tidak ada alokasi	-	-

Capaian program prioritas nasional terkait pembiayaan pendidikan hingga triwulan 4 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Program Indonesia Pintar terealisasi 18,8 juta orang dari target 17,9 juta orang
- KIP Kuliah teralisasi 1,4 Jt mahasiswa dari target 1, juta
- Beasiswa ADIK terealisasi 6.005 orang dari target 6.482 orang
- Beasiswa ADEM terealisasi 2.466 orang dari target 2.895 orang, serta
- Aneka Tunjangan terealisasi 291 ribu orang dari target 347 ribu orang.

Salah satu penerima manfaat dari program layanan pembiayaan pendidikan yaitu Sugeng Santoso, Guru dari SMAN Glenmore Banyuwangi yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurutnya program ini sangat perlu bagi guru terutama untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap peserta didik, sehingga kompetensi peserta didik bisa dikembangkan secara maksimal baik potensi akademik maupun potensi non akademik. Menurut Sugeng TPG juga dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru untuk terus selalu menimba ilmu dari berbagai sumber, baik melalui diklat, seminar ataupun *workshop*. Harapannya agar program TPG dapat melekat pada gaji guru.



Ditjen PAUD Dikdasmen

Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak, Progres capaian: dari target 5 indikator output, ada 1 yang realisasi melebihi target dan 2 yang tidak tercapai sesuai target, dan 2 yang tidak terlaksana.

Permasalahan dan kendala: terdapat sekolah yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sehingga terjadi beberapa kali perubahan SK, kurangnya pemahaman sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar, beberapa sekolah mengalami kesulitan terkait sarana dan prasarana (Listrik, dan akses internet), adanya PPKM, dan pelaksanaan monev secara manual oleh semua satker sehingga kesulitan dalam konsolidasinya, dan adanya penetapan target *quick wins* lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga realisasinya lebih rendah dari targetnya.

Rekomendasi dan tindak lanjut: mencari kepala sekolah Pengganti yang telah di training oleh pelatih ahli kemudian diinternallisasikan komitmen terkait program sekolah penggerak, dan menjalin kemitraan dengan lintas kementerian (kemendesa, kominfo, kemdagri), pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kesenjangan digital. Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 7 indikator output. 2 indikator output telah dilaksanakan di tahun 2020 sehingga ditahun berikutnya tidak perlu dilaksanakan lagi, dan ada 5 indikator output yang ditargetkan di 2021-2024 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilaksanakan lagi. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Pemerintah daerah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan Merdeka Belajar.							
1	Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	2 dok (SPK, MoU)	2 Dok (SPK, MoU)	100,00 %			
2	Sosialisasi Calon Pemerintah daerah pelaksana program Sekolah Penggerak	548 Pemda	34 Provinsi 514 Kab/Kota	100,00 %	2.634.320.000	2.617.763.471	99,37%
3	Seleksi dan penetapan pemerintah daerah sebagai pelaksana program sekolah penggerak	34 Provinsi 111 Kab/Kota	34 Provinsi 111 Kab/Kota	111,00%	data dukung yang diminta hanya MOU dan Permendikbud Sekolah Penggerak jadi tidak ada anggaran untuk penerbitan 2 produk hukum ini.		
4	Penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak	2.800 sekolah	2.499 Satuan Pendidikan (Pauddasmen)	89,25%			
5	Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	2.800 sekolah	2.499 Satuan Pendidikan (Pauddasmen)	89,25%	13.205.366.000 (Dit SMP) 14.185.580.000 (Dit SMA)	13.120.850.846 (Dit SMP) 14.140.173.072 (Dit SMA)	99,36% (Dit SMP) 99,68% (Dit SMA)

6	Monitoring dan evaluasi program sekolah penggerak	34 Provinsi 100 Kab/Kota	Belum terkonsolidasi nya hasil monev yang di lakukan oleh seluruh satker dan masih malakukan secara manual, sehingga perlu Perencanaan Bersama terkait pembagian peran monev penggerak yang di kordinir BSKAP	2.728.232.000 (Dit SMP)	2.705.636.010 (Dit SMP)	99,17% (Dit SMP)
---	---	-----------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---------------------

Salah satu penerima manfaat PSP adalah Dede Setiawan, Kepala Sekolah SDN Citalem Bandung. Banyak manfaat yang telah dirasakan dengan mengikuti PSP ini, baik untuk sekolah, guru-guru, siswa, maupun untuk dirinya sendiri selaku Kepala Sekolah. Dalam hal peningkatan SDM, Kepala Sekolah SDN Citalem sudah mengikuti beberapa kegiatan, yaitu Bimtek Komite Pembelajaran selama 10 hari, IHT PSP yang didampingi oleh tenaga ahli dari Kemendikbudristek selama 8 hari, pendampingan oleh tenaga ahli dari Kemendikbudristek selama 4 pertemuan, dan yang akan datang akan didampingi selama 3 tahun ke depan, hal ini akan menambah wawasan/pengalaman yang luar biasa bagi penerima manfaatnya. Hambatan yang dirasakan adalah keterbatasan tenaga guru, keterbatasan sarana, keterbatasan pengetahuan TIK. Hal itu terjadi karena kurangnya guru, ruang kelas dan peralatan rusak sedang dan berat, serta penguasaan TIK yang masih lemah. Dede menilai PSP program yang bagus dan berharap program ini terus berlanjut.

Penerima manfaat lainnya adalah Ni Wayan Rapiyanti, Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Denpasar, menurutnya dampak positif PSP adalah penerima manfaat diberikan kebebasan dalam berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran di sekolah dan mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan kekurangannya adalah sosialisasi yang masih minim sehingga penerima manfaat mengalami kebingungan tentang apa yang harus dikerjakan. Harapannya agar PSP dapat lebih sering di sosialisasikan sehingga maksud dan tujuan yang sebenarnya diinginkan dapat dipahami, semoga program PSP dapat berjalan sehingga sekolah bisa memberikan.

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak, Progres capaian: dari target 2 indikator output realisasinya melebihi dari target, sebagian Calon Guru Penggerak (CGP) angkatan 1 yang belum memiliki Pengajar Praktik (PP) di tahun 2020 menunggu baru dijalankan pendidikan di angkatan berikutnya pada tahun 2021, 16 kabupaten (angkatan 2 dan angkatan 4) tidak dijalankan karena CGP atau PP tidak memenuhi kuota minimal.

Permasalahan dan kendala: Peserta atau PP harus saling tercukupi dan memenuhi kuota sasaran minimal, Kendala Jaringan, kemampuan literasi IT calon peserta. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah optimalisasi sosialisasi, *coaching clinic*, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung program ini. Membuka pool dari jalur internal PGP, misal rekrutmen PP dari CGP, dan menjalankan Skenario PGP Daerah Khusus.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 2 indikator output. 2 indikator output telah dilaksanakan di tahun 2020-2021 sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah peserta Pendidikan guru Penggerak	13.100	13.994	107,00%	454.438.580.000	360.478.442.409	79,32
2	Jumlah titik wilayah sasaran peserta Pendidikan Guru Penggerak	262	274	105,00%			

Salah satu penerima manfaat dari program guru penggerak adalah Yasser Arafat, Wakil Kepala Sekolah SMAN 4 Wajo. Menurutnya pendidikan guru penggerak adalah episode ke-5 dari Program Merdeka Belajar untuk transformasi dan perubahan *mindset* dengan berfokus pada perubahan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pendidikan untuk menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Dampak positif yang dirasakan oleh Yasser Arafat adalah terdapat perubahan pola pikir dalam manajemen pendidikan. Perubahan tersebut bukan saja lahir pada diri sendiri, akan tetapi juga berimbas kepada rekan guru yang lain, kepada peserta didik, maupun kepada satuan pendidikan. Kekurangan yang dirasakan program tersebut masih perlu refleksi dan evaluasi, termasuk hingga selesainya peserta mengikuti program tersebut, naskah akademik guru penggerak belum pernah dibaca, sehingga peserta terkadang masih berpikir setelah lulus, bagaimana posisi di program tersebut selain sebagai agen perubahan transformasi Pendidikan. Selain itu kendala kegiatan saat proses daring adalah kondisi jaringan internet yang bermasalah serta perlu penyesuaian perubahan mekanisme dari luring menjadi daring terhadap kebijakan PPKM yang berlaku.

Harapan kedepannya agar program ini tetap dilanjutkan, dan tetap menjadi program unggulan Kemdikbudristek. Selain itu diharapkan juga Guru Penggerak Angkatan 1 yang dianggap berprestasi selama pendidikan berlangsung, bisa direkrut menjadi fasilitator pada angkatan berikutnya, sehingga mutu Guru Penggerak akan tetap eksis tanpa perlu merekrut fasilitator dari orang yang baru memahami program tersebut.

Ditjen Pendidikan Tinggi

1. Kampus Merdeka

Program Kampus Merdeka (Penerapan Pelaksanaan Sebagian Kurikulum di Luar Prodi dan Perguruan Tinggi), Progres capaian: dari target 2 indikator output 1 indikator realisasinya melebihi dari target, diharapkan 80 prodi yang diberikan bantuan tersebut melaksanakan tujuan program untuk mendorong prodi menjadi pusat percontohan dalam hal reorientasi kurikulum dan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Permasalahan dan kendala: Penerima bantuan secara umum masih terpusat di pulau Jawa. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah Perlu diberikan kesempatan bagi prodi di luar Jawa dengan persyaratan khusus. Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 2 indikator output. 2 indikator output telah dilaksanakan di tahun 2020-2021 sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Program studi memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi.							
1	Jumlah prodi yang mendapatkan pembinaan.	735	582	79,18%	37.700.000.000	37.537.652.466	99,57
2	Jumlah prodi yang menjadi model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.	75	80	106,67%	11.250.000.000	10.942.595.900	97,27

Dari sisi penerima manfaat program kampus merdeka belajar dapat memberi kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan sehingga merdeka dari birokratisasi, dosen pun dapat dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Salah satu penerima manfaat dari program ini adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, menurutnya dengan adanya program ini perguruan tinggi Indonesia dapat terus maju dan berkembang serta berkontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa untuk memenangi kompetisi global, dan mendorong pimpinan Perguruan Tinggi di tanah air untuk terus mendukung program-program yang diluncurkan kampus merdeka dan mencapai indikator utama.



2. Kedaireka Kampus Merdeka

Program Kedaireka Kampus Merdeka, Progres capaian: dari target 3 indikator output 3 indikator realisasinya melebihi target, diharapkan Jumlah anggota platform kedaireka (pihak perguruan tinggi, dunia industri dan dunia usaha). Permasalahan dan kendala: Ada beberapa kendala yang dialami oleh tim dalam pengembangan platform Kedaireka, seperti : kurangnya manpower yang menguasai aspek design UI/UX sehingga pengembangan yang ada lebih bersifat teknis atau functionality. Resource design yang ada, diarahkan lebih lanjut untuk pengembangan matching fund dan kedaireka academy. Selain itu, keseluruhan manpower teknis dari platform Kedaireka bersifat part time (bukan full time PNS atau kontrak) sehingga pengembangan platform Kedaireka memiliki waktu yang relatif terbatas.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Rekomendasi tindak lanjut adalah: Pengembangan platform Kedaireka dan *Matching Fund* harus bersifat *full time job* dengan kompensasi yang disesuaikan dengan market. Selain itu, pedoman dan roadmap mengenai platform Kedaireka ke depan sangatlah penting, khususnya jika program Matching Fund sudah selesai dilakukan.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 3 indikator output. 3 indikator output telah dilaksanakan di tahun 2020-2021 sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Perguruan tinggi memiliki program inovasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat melalui peninjauan dan kesepakatan kerja sama dalam Platform Kedaireka.id dan mendapatkan dana padanan melalui skema matching fund.							
1	Jumlah anggota platform kedaireka (pihak perguruan tinggi, dunia industri dan dunia usaha).	7.000	21.620	355,83%	203.572.817.000	203.001.693.064	99,72
2	Jumlah program yang dibiayai oleh matching melalui platform kedaireka.	120	427				
3	Jumlah dana padanan dari pihak industri ke dalam proyek kerja sama kedaireka.	250.000.000.000	296.168.963.021	118,47%	203.572.817.000	296.168.963.021	145,49

Salah satu penerima manfaat dari program ini adalah Roza Yusfiandayani, Institut Pertanian Bogor. Menurut Roza program Kedaireka Kampus Merdeka ini sangat baik dan keren karena memiliki banyak dampak positif oleh penerima manfaat. Dampak positif yang dirasakan yaitu dapat bermitra dengan industri untuk komersialisasi inovasi, selain *impact* yang baik. Adapun kekurangannya yaitu pengumuman yang cukup memakan waktu terkait kelulusan untuk program *matching fund* ini. Sebagai contohnya, Roza mengirimkan proposal bulan maret 2021, verifikasi kelayakan pertama adalah bulan Juni 2021, verifikasi kelayakan ke dua bulan Juli 2021 dan baru pencairan dana dari Kemendikbudristek pada tanggal 6 Agustus 2021.

Hambatan yang dialami oleh Roza adalah permasalahan waktu yang pendek dalam menjalankan program. Hal tersebut terjadi karena pengumuman kelulusan *matching fund* dan pencairan dana *matching fund* di bulan Agustus, jadi pelaksanaan baru dapat dimulai pada bulan Agustus–Desember 2021 (5 bulan). Harapan dari program ini agar *upload* proposal di *platform* kedaireka dilaksanakan di bulan Oktober 2021–Januari 2022 karena penilaian oleh tim *reviewer* dari bulan Januari–Maret 2022, lalu pengumuman ke universitas dari bulan Maret–April dan dapat diproses dokumen SPK yang dilakukan bulan April, kemudian finalisasi untuk pencairan dana dari Kemendikbudristek ke universitas bulan Mei sehingga bulan Juni inovator sudah bisa bergerak dengan cepat.

3. Pengembangan Talenta Digital

Program Pengembangan Talenta Digital, Progres capaian: dari target 2 indikator output 1 indikator realisasinya melebihi target, diharapkan 3500 Jumlah mahasiswa yang ikut micro credentials melalui Bangkit. Permasalahan dan kendala: Target tidak sesuai dengan perencanaan Tim Bangkit.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Mahasiswa mengikuti *Silicon Valley Meet up* (anggaran belum tersedia di bulan maret 2. 022) Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 2 indikator output. 1 indikator output telah dilaksanakan di tahun 2020-2021 dan 1 indikator output baru dimulai dilaksanakan di tahun 2021, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Mahasiswa yang memiliki sertifikat micro credentials: a. Artificial Intelligence; b. Data Science; c. Machine Learning; d. Programming; dan e. Cloud Computing.							
1	Jumlah mahasiswa yang ikut micro credentials melalui Bangkit.	3.500	3.001	85,74%	2.000.000.000	1.002.000.000	50,10
2	Jumlah mahasiswa yang ikut micro credentials melalui AI Consortium.	1.000	2.189	106,67%	3.000.000.000	1.646.129.500	54,87

Dari sisi penerima manfaat program Pengembangan Talenta *Digital*, menurut Christian Dosa dari Universitas Brawijaya, program ini merupakan program satu semester yang menawarkan tiga jalur pembelajaran untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang teknologi. Program ini dilaksanakan atau digagas oleh Google yang bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia dan Traveloka dibawah naungan Program Kampus Merdeka.

Menurut Chris, program ini sangat bermanfaat terlebih untuk mahasiswa yang sering masih memiliki *gap skill* dengan industri, dengan program ini dapat menghasilkan *digital talent* yang siap menghadapi dunia industri dengan standar internasional. *Impact* positif yang dirasakan oleh Chris dari kegiatan tersebut adalah mahasiswa mengerti bagaimana standar perusahaan besar contohnya seperti Google dalam membuat produk sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Dampak yang dirasakan secara langsung, mahasiswa dapat mengerti kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi *industry digital* dengan baik dari mulai *hard skill* maupun *soft skill*. Hambatan dari program ini adalah pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan secara langsung dan pemahaman yang ditangkap dari para peserta bimbingan teknis menjadi tidak maksimal. Harapannya agar kurikulum yang terlalu padat dapat disesuaikan kembali sehingga program Pengembangan Talenta *Digital* memiliki persentase kelulusan 100% dari total peserta program.

Ditjen Pendidikan Vokasi

1. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan

Program Pengembangan SMK Pusat Keunggulan, Progres capaian: dari target 7 indikator output, 5 indikator output realisasinya melebihi target, dan 2 indikator output realisasinya tidak melebihi target. Pembangunan fisik berupa Ruang Praktik sudah hampir selesai dilaksanakan, pengadaan peralatan praktik sedang proses penyelesaian serta pelaksanaan pendampingan oleh Perguruan Tinggi Vokasi. Permasalahan dan kendala: tidak ada permasalahan dan kendala.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 8 indikator output. 1 indikator output ditargetkan hanya di tahun 2020 dan telah dilaksanakan di tahun 2020, sehingga tidak perlu dilanjutkan ditahun berikutnya. 6 indikator output yang ditargetkan tahun 2020-2024, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator output ditargetkan di tahun 2021-2024, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
SMK yang mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang memiliki kemitraan dan penyesuaian dengan DUDIKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.							
1	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor Permesinan dan Konstruksi	90	105	116,67%	370.080.030.000	369.426.981.000	99,82
2	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor <i>Hospitality</i>	100	99	99,00%	218.480.084.000	218.033.598.690	99,80
3	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor Ekonomi Kreatif	100	118	118,00%	245.000.004.000	244.351.089.624	99,74
4	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor <i>Care giver/Care Service/Calon Pekerja Migran</i>	15	19	126,67%	39.388.230.000	39.388.230.000	100,00
5	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor Kerjasama Luar Negeri	40	35	87,50%	47.499.975.000	42.578.705.138	89,64
6	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Sektor Lainnya	50	54	108,00%	140.471.730.000	140.471.730.000	100,00
7	SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) Berbasis Revolusi Industri 4.0 dan Kawasan Prioritas Nasional	31	31	100,00%	71.300.000.000	70.225.000.000	98,49

Salah satu penerima manfaat program pengembangan SMK Pusat Keunggulan adalah Indra Gita Saragih, Kepala Sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara, menurutnya Program SMK PK sangat baik, karena dapat membantu dan mendorong SMK untuk lebih baik lagi dalam mengelola sekolah dan lebih memiliki hubungan yang intens dengan industri.

Dampak positif yang diperoleh SMK dapat membentuk lulusan yang lebih kompeten, membantu SMK untuk lebih *match* dengan industri, dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta membantu sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana praktik di sekolah. Hanya saja program dilaksanakan di waktu yang sempit karena proses pencairan dana disesuaikan dengan tahap bimtek, sehingga apabila SMK melaksanakan bimtek di tahap akhir maka hanya memiliki waktu yang singkat dalam pelaksanaan. Harapan ke depannya agar program tersebut dapat dilanjutkan sehingga banyak SMK yang terbantu dalam mengembangkan SMK lainnya.

Selain itu penerima manfaat lainnya adalah Anak Agung Gede Agung Udiyana Putra, guru SMK Negeri 5 Denpasar yang mendukung program pengembangan SMK PK untuk dapat menghasilkan lulusan SMK yang lebih berkualitas dengan. Dampak positif sekolah memiliki manajemen yang lebih profesional, guru dituntut untuk lebih menguasai teknologi, akan tetapi belum semua guru bisa terlibat dengan maksimal program ini. Saran ke depannya agar program ini benar-benar dipersiapkan dengan baik dari pusat sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi sekolah yang menerapkan program SMK Pusat Keunggulan.



2. Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi

Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Melalui *Link and Match* Kampus Vokasi Dengan IDUKA, Progres capaian: dari target 2 indikator output, 2 indikator output realisasinya melebihi target. Permasalahan dan kendala: finalisasi konsep, petunjuk teknis, dan panduan program memerlukan waktu yang lebih panjang dari yang telah diperkirakan, sehingga berdampak pada mundurnya pengumuman/ launching yang juga berdampak pada mundurnya timeline pelaksanaan program, proses penyaluran anggaran melalui mekanisme realokasi DIPA bagi penerima bantuan PSTBI memakan waktu yang cukup Panjang, sehingga berdampak pada terlambatnya dana disahkan menjadi DIPA pada masing-masing politeknik. I

nstrumen penilaian usul transformasi/upgrading program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan dirasa terlalu berat, sehingga dilakukan reivisi dan penyesuaian terhadap instrument dimaksud. Saat ini revisi instrument sedang dalam tahapan finalisasi dan menunggu persetujuan. Hingga mendekati akhir masa pelaksanaan program, masih terdapat cukup banyak program studi Diploma Tiga penerima bantuan yang belum mendaftarkan usul transformasi/ upgrading menjadi Sarjana Terapan melalui laman silemkerma. Hal yang sama juga terjadi pada usulan pembukaan program studi Diploma Dua Jalur Cepat.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 2 indikator output, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah PT mendapatkan program Penguatan Program studi pendidikan tinggi vokasi dan Profesi.	30 PT	34	113,00%	40.634.286.000	25.139.084.649	61,87%
2	Jumlah Penguatan Program studi pendidikan tinggi vokasi dan Profesi.	75 prodi	116	155,00%			

Dari sisi penerima manfaat, menurut Budi Hartanto salah satu dosen dari Universitas Negeri Semarang, pendidikan vokasi merupakan model pendidikan yang mengusung keunggulan berupa 70% praktek dan 30% teori dengan harapan dapat menjadi salah satu jawaban dalam permasalahan penyiapan lulusan perguruan tinggi dengan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Era revolusi industri 4.0 adalah satu tahapan masa yang hadir dengan membawa gelombang yang disebut disrupsi yaitu suatu kondisi dimana perubahan yang terjadi di dunia industri berlangsung sangat cepat, mendasar, dan bahkan terkesan mengaduk-aduk pola lama untuk menghasilkan tatanan baru.

Dampak yang didapatkan dari program ini penerima manfaat mendapatkan sarana prasarana untuk memenuhi standar penyelenggaraan kurikulum yang relevan dalam proses pembelajaran vokasi melalui *teaching factory/teaching Industry*, kesempatan magang bagi mahasiswa di industri serta kesiapan menyerap produk hasil praktik mahasiswa.

Namun ada beberapa hal yang masih menjadi titik lemah pendidikan vokasi di Indonesia yaitu kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas, kelengkapan sarana prasarana yang menyerupai atau bahkan sama dengan yang digunakan oleh industri, kurikulum yang harus terus disesuaikan dengan perubahan jaman, dan pembekalan karakter bagi lulusan agar memiliki *soft skills* yang diharapkan oleh industri.

Harapan yang di inginkan adalah pendidikan vokasi harus terus berupaya melakukan pembinaan karakter pada peserta didiknya misalnya dengan mendatangkan para pakar kepribadian atau memanfaatkan kerjasama dengan industri untuk menghadirkan bagian personalia di perusahaan terkait agar dapat menyampaikan secara langsung di hadapan peserta didik tentang bagaimana kebutuhan tenaga kerja sesungguhnya, khususnya terkait dengan karakter yang dibutuhkan begitupun pemerintah dan industri bisa turut membantu penyediaan peralatan praktek bagi mahasiswa. Kekuatan pemerintah dengan sumber dana yang tersedia cukup besar bagi pendidikan tentu dapat mendukung hal tersebut.

3. *Link and Match* Pendidikan Kecakapan

Program *Link and Match* Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Progres capaian: dari target 1 indikator output, realisasinya melebihi target. Permasalahan dan kendala: tidak mengalami permasalahan dan kendala yang berarti.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 1 indikator output, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output	Volume			Anggaran		
	Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Jumlah lulusan program PKK yang diterima bekerja di IDUKA.						
1 Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK).	50.000	63.839	127,68%	200.286.056.000	199.944.392.437	99,83%

Link and Match Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dengan output utama jumlah peserta didik program PKW yang memiliki inkubator rintisan usaha. Hingga saat ini telah diberikan bantuan kepada 15.447 orang untuk mengikuti program PKW dari target 16.676 orang. Target peserta didik adalah anak putus sekolah atau lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan di rentang umur 17-25 tahun.

4. *Link and Match* Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Program *Link and Match* Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Progres capaian: dari target 1 indikator output, realisasinya melebihi target. Sasaran dan anggaran terjadi penambangan karena adanya realokasi anggaran dari PTVP ke Ditsuslat sebanyak 4,600 peserta didik (dari 16,676 menjadi 21,276).

Permasalahan dan kendala: tidak mengalami permasalahan dan kendala yang berarti. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 1 indikator output, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Jumlah peserta didik program PKW yang memiliki inkubator rintisan usaha.							
2	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).	21.296	22.437	105,35%	118.057.858.000	116.735.995.630	98,88%

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan salah satu program prioritas nasional yang juga menjadi target output yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah maupun RPJMN. Sehingga harus mendapatkan prioritas pendanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Ditjen Kebudayaan

1. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Museum

Program Pembentukan BLU Museum, Progres capaian: dari target 1 indikator output, realisasinya sesuai dengan target. 1 Juni 2021 pengelolaan BLU Museum Nasional sudah berjalan, Review OTK Museum Nasional, penyesuaian Tugas dan Fungsi, penyesuaian Struktur Organisasi Museum, pemetaan SDM Museum Nasional, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, persiapan fasilitas BLU (pembuatan ruang pameran imersif “digital video” Alam dan Budaya Indonesia, pembentukan Struktur Organisasi, penyusunan Standar Pelayanan Minimal, penataan pegawai menyesuaikan Struktur Organisasi, peningkatan kompetensi pegawai.

Permasalahan dan kendala: perubahan pengelolaan keuangan, tarif layanan Museum, pembukaan rekening Pengelolaan Keuangan BLU, penyesuaian tarif baru layanan museum masih progress dengan Kementerian Keuangan, proses administrasi pengembangan konten, pengadaan peralatan (inden), menyatukan pemahaman dengan struktur organisasi yang baru. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: menyusun rencana bisnis dan anggaran BLU, pangajuan Revisi DIPA 2021 menjadi DIPA BLU Ke Kanwil Ditjen. Perbendaharaan, ijin membuka rekening BLU ke Kuasa BUN Daerah (KPPN Mitra Kerja), menyusun/ menyempurnakan SOP Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Barang/Jasa,

mengusulkan perubahan tarif layanan museum dan renumerasi, asesmen pegawai Museum Nasional, melaksanakan penataan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru/Pokja, pelatihan dan diklat peningkatan kompetensi pegawai, pembekalan terkait dengan Jabatan Fungsional, sertifikasi tenaga teknis di museum, dan pelaksanaan penyusunan SPM Museum.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 3 indikator output, 1 indikator output target ditetapkan tahun 2020, sudah dilaksanakan, sehingga ditahun berikutnya tidak perlu dilanjutkan, 1 indikator output target ditetapkan tahun 2021, sudah dilaksanakan, sehingga ditahun berikutnya tidak perlu dilanjutkan, dan 1 indikator output target ditetapkan tahun 2022-2024, belum dilaksanakan, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Museum							
2	Terwujudnya Penetapan sebagai BLU Museum	Penguatan kapasitas, pemetaan kelembagaan, dan reorientasi model bisnis permuseuman	Telah terlaksana	100,00%	190.000.000	183.810.000	96,74%

Pembentukan BLU Museum merupakan langkah awal dalam pembentukan BLU di Bidang Kebudayaan yang diawali oleh Satker Museum Nasional dan menurut penerima manfaat yaitu Dikri Muhammadi, program ini merupakan langkah yang sangat baik, akan tetapi perlu diperhatikan proses transisi menuju BLU.

Dampak positif yang dirasakan yaitu memacu peningkatan kinerja karena berorientasi target pendapatan dan peningkatan layanan museum, karena masih dalam tahap transisi, menurut Dikri program ini belum memiliki hambatan yang besar karena program baru berjalan, saran yang diberikan agar program ini terus diberikan sosialisasi yang baik. Saran lainya agar pemahaman terkait BLU ini dapat di optimalkan oleh setiap pegawai sehingga pelayanan museum dapat ditingkatkan secara maksimal.

2. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Progres capaian: dari target 3 indikator output, realisasinya 3 indikator output sesuai dengan target. Sedangkan proses verifikasi baru penilaian Substansi, proses upload persyaratan Administrasi, sudah dilaksanakan pendaftaran dan seleksi substansi oleh Komite Seleksi, pelaksanaan seleksi FBK 2021 mulai dari seminar pra-pendaftaran, informasi seleksi, pendaftaran, sampai tahap seleksi dilakukan secara terintegrasi melalui laman fbk.id, jumlah proposal masuk ada 4.419 berkas, proposal yang dinilai ada 1.837 berkas, dan proposal yang lulus substansi sesuai pagu 128 berkas, verifikasi

laporan di bulan Juni 2021. Permasalahan dan kendala: Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 3 indikator output, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Terwujudnya platform penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan.							
1	Tersusunnya Petunjuk Teknis tentang Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Revisi Petunjuk Teknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Sudah disusun juknis tahun 2021	100%	47.427.702.000	46.519.525.132	98,09%
2	Terwujudnya platform penyaluran bantuan bidang kebudayaan yang terkonsolidasi dan bersifat lintas-Satker dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pelaksanaan Verifikasi dan Penetapan penerima Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Sudah dilaksanakan verifikasi dan lokakarya penerima FBK	100%			
3	Terlaksana Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Pelaksanaan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan oleh Penerima FBK	Dijadwalkan dilaksanakan mulai Oktober - Desember 2021	100%			

Output utama dari *Quick Win* fasilitasi bidang kebudayaan adalah terwujudnya *platform* penyaluran fasilitasi bidang Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat 3 indikator yang mendukung *output* ini dengan capaian sebagai berikut:

- Petunjuk teknis tentang Fasilitasi Bidang Kebudayaan telah selesai disusun pada awal tahun 2021.
- Pada indikator terwujudnya *platform* penyaluran bantuan bidang kebudayaan yang terkonsolidasi dan bersifat lintas-satker dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, telah dilakukan seleksi proposal, verifikasi lapangan serta penetapan calon penerima bantuan dengan melibatkan budayawan, aktivis budaya, profesional, tim Ditjen Kebudayaan, serta UPT.
- Pelaksanaan seleksi memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah panitia dan peserta. Kendala yang dihadapi verifikasi lapangan terhambat PPKM selama lebih dari 2 bulan (Juli - Agustus 2021), sehingga tindak lanjutnya adalah percepatan pelaksanaan kegiatan.

Pada indikator terlaksana fasilitasi bidang kebudayaan, penyaluran anggaran FBK akan dilakukan sampai akhir September 2021 sehingga pelaksanaan kegiatan para penerima bantuan akan dimulai pada bulan Oktober 2021. Kendala yang dihadapi adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas (3 bulan), rencana tindak lanjutnya dilakukan pemantauan lebih ketat supaya penerima bantuan dapat menyelesaikan kegiatan di bulan Desember 2021.

3. Penetapan Jalur Rempah

Program Penetapan Jalur Rempah, Progres capaian: dari target 1 indikator output, realisasinya sesuai dengan target. Penyebarluasan narasi Jalur Rempah melalui kerjasama pengetahuan dengan UNUSIA (seminar, pameran, penerbitan), partisipasi dalam gerakan bangga sebagai Indonesia, partisipasi dalam kegiatan Spice Up the World Kemenko Marves (Maritim dan Investasi), pengembangan dan promosi narasi jalur rempah melalui website jalurrempah.kemdikbud.go.id. Permasalahan dan kendala: Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti: Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 4 indikator output, yaitu: 1 indikator output ditarget di tahun 2020, sehingga ditahun berikutnya tidak perlu dilanjutkan, 1 indikator output ditarget tahun 2021-2022, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 1 indikator ditargetkan pada tahun 2022-2023, sehingga di tahun ditetapkan target pelaksanaannya perlu dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator ditarget tahun 2023-2024, sehingga ditahun ditetapkan target pelaksanaannya perlu dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Pengakuan jalur rempah sebagai Warisan budaya Dunia.							
1.	<i>Voluntary Submission</i> disetujui	Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan; Pengembangan Database dan Publikasi; Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; Penyusunan Dossier untuk Voluntary Submission; Pengembangan kerjasama dan partisipasi publik; Penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	Seluruh calon atribut Jalur rempah di Pesisir Utara Jawa sudah selesai disurvei	100%	21.315.000.000	21.228.606.273	99,59%

Indonesia adalah negeri rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di kepulauan Indonesia telah menarik minat suku-suku dan bangsa-bangsa untuk datang dan berniaga dengan Bangsa Indonesia. Jalur rempah telah menciptakan simpul-simpul keindonesian antar wilayah di Nusantara dan menempatkan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Di tingkat internasional, rempah-rempah telah mendorong perubahan peradaban secara mendasar.

Dalam rangka merevitalisasi hubungan historis yang difasilitasi oleh Jalur rempah, serta menarik dukungan dari dunia internasional dalam rangka penetapan Jalur rempah sebagai Warisan Budaya Dunia, diselenggarakan kegiatan antara lain Karavan Budaya berbasis WBTB dan CB. Kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan budaya serta diplomasi budaya Indonesia di luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB).

Output utama dari *Quick Wins* penetapan jalur rempah adalah pengakuan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Terdapat 4 indikator yang mendukung *output* ini dengan capaian 17 lokasi di pesisir utara jawa sudah disurvei dan sudah dilakukan pembobotan terhadap cagar budaya-cagar budaya yang berpotensi dijadikan sebagai calon atribut jalur rempah. Adapun kendala dan tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut:

- Kendala pencantuman jalur rempah ke dalam *tentative list* membutuhkan daftar calon atribut yang akan diusulkan. Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa bahan, setidaknya ada 67 lokasi dengan puluhan cagar budaya yang berpotensi sebagai calon atribut. Survey lapangan diperlukan untuk mengecek kondisi setiap calon atribut sehingga memerlukan biaya dan waktu untuk mencakup seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan prioritas dan pantahapan dalam survei lapangan di tahun 2020 Pesisir Utara Jawa, tahun 2021 Pesisir Barat dan Timur Sumatera, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, tahun 2022 Pesisir Kalimantan, Pesisir Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Pencantuman dalam *tentative list* baru bisa dilakukan pada tahun 2023.
- Jalur rempah harus terlebih dahulu dicantumkan dalam *tentative list*. Hal ini baru bisa dilaksanakan setidaknya pada tahun 2023. Selain itu, sudah ada dua calon Warisan Dunia yang saat ini sedang berproses: Kebun Raya Bogor dan Yogyakarta. Tindaklanjutnya adalah nantinya akan perlu keputusan politis terhadap pengusulan Jalur rempah jika memang akan diprioritaskan karena Kebun Raya Bogor dan Yogyakarta sudah lebih dulu berproses.
- *Official Submission* baru bisa dilakukan bila jalur rempah telah melakukan *voluntary submission* dan dinyatakan "*complete*". Jika hasil *voluntary submission* masih "*incomplete*", maka Jalur rempah belum akan beranjak ke *official submission*. Perlu ditelaah kembali target waktu 2022 mengingat survei lapangan untuk seluruh titik setidaknya baru akan selesai di 2023.
- Penyusunan naskah nominasi dan rencana pengelolaan baru bisa dilakukan di tahun 2023. Kebun Raya Bogor dan Yogyakarta merupakan kandidat warisan dunia berikutnya. Saat ini tim dari kedua situs sudah menyusun naskah nominasi. Besar kemungkinan, jalur rempah harus menunggu sampai salah satu ditetapkan sebagai Warisan Dunia. Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah perlu ditelaah kembali target waktu pengiriman 2023 karena keseluruhan naskah nominasi dan rencana pengelolaan belum disusun.

Salah satu penerima manfaat dari program ini adalah Agung dari komunitas Jalur rempah, menurut Agung Program jalur rempah adalah program prioritas Kemdikbudristek di tahun 2021, yang mana program ini mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Program tersebut membuat komunitas-komunitas anak muda yang ada di Banda Neira memperoleh manfaatnya melalui *workshop* dan pelatihan langsung sesuai bidang-bidangnya.

Dampak positif yang didapatkan adalah dalam hal pengembangan sumber daya manusia, karena dalam program ini banyak menyuguhkan edukasi dan program ini menjadi banyak diketahui orang. Hambatan karena kondisi *covid-19* dan pemberlakuan PPKM.

Inspektorat Jenderal

1. Pengawasan Berbasis TIK

Program Pengawasan Berbasis TIK, Progres capaian: dari target 3 indikator output, 2 indikator output realisasinya tidak sesuai dengan target, 1 indikator output realisasinya tidak terlaksana sesuai dengan target. Program tersebut belum dilaksanakan karena anggaran yang tersedia dialihkan untuk membiayai program lainnya (refocussing anggaran), dengan kebijakan pusat data nasional yang dikelola kominfo, dan pelaksanaan pekerjaan pengembangan sistem informasi terpadu, pengembangan aplikasi simak simontila. Permasalahan dan kendala: kebijakan refocussing anggaran dan hasil analisis kominfo cukup menggunakan infrastruktur Pusat Data Nasional (kominfo).

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Hasil analisis Kemenkoinfo cukup menggunakan infrastruktur Pusat Data Nasional sehingga Tidak dilakukan pembelian infrastruktur. Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 3 indikator output, 2 indikator output target tahun 2020-2024, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 1 indikator ditarget tahun 2021-2022, sehingga ditahun berikutnya perlu dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. dan 1 indikator ditarget tahun 2023-2024, sehingga ditahun ditetapkan target pelaksanaannya perlu dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Output Utama/ Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Internal Berbasis TIK yang handal.							
1.	Tata Kelola	1. Penetapan struktur organisasi pengelola 2. POS Implementasi TIK 3. Bimtek SDM pengelola	1	100,00%	457.568.000	453.008.000	99,00%
2.	Penguatan infrastruktur	1. peningkatan kemampuan server 2. penguatan keamanan jaringan	0	0	0	0	0



3.	Pengembangan Aplikasi	1. Kelompok aplikasi utama a. aplikasi audit kinerja b. aplikasi audit tujuan tertentu c. aplikasi efektivitas manajemen tertentu d. aplikasi ZI-WBK e. aplikasi akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah f. aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan g. aplikasi pemantauan pelaksanaan program h. aplikasi asistensi 2. Kelompok aplikasi pendukung a. persuratan elektronik b. aplikasi perencanaan c. aplikasi pengaduan d. aplikasi surat tugas e. web portal 3. Kelompok aplikasi infrastruk-tur a. Layanan SSO b. Monitoring DC c. Monitoring Sarpras d. Sistem Akses e. Manajemen Pemeliharaan f. Kecerdasan buatan g. Web service internal h. Web service eksternal 4. Kelompok aplikasi informasi eksekutif a. Dashboard pimpinan b. Pangkalan Data	1	100,00%	150.000.000	146.300.000	97,53%
----	-----------------------	---	---	---------	-------------	-------------	--------

Badan Standar Kurikulum, Asesmen dan Pendidikan

1. Asesmen Diagnosis

Program Asesmen Diagnosis, Progres capaian: dari target 1 indikator output, realisasinya sesuai dengan target, sudah tersusun draft Buku saku, Videografis, Aplikasi, Modul (8), pelaksanaan ujicoba asesmen diagnosis koginitf awal pada beberapa Satuan Pendidikan 8 satuan pendidikan di Bandung (SD, SMP, SMA), Buku saku, Videografis, Aplikasi, Modul (8), Terlaksananya Sosialisasi asesmen diagnostik berkala awal pembelajaran (melalui webinar yang telah diikuti oleh 29.000 peserta) Modul asesmen diagnostik di awal pembelajaran telah dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi ribuan pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan.

Buku saku diagnostik berkala telah dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi ribuan pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan. Videografis telah disimak oleh 16.000 penonton sebagai acuan untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran di satuan pendidikan. Aplikasi AKSI Sekolah telah digunakan oleh pendidikan untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

Permasalahan dan kendala: Bahan yang disiapkan pada saat masa pandemi, diskusi hanya dapat dilakukan secara virtual. Kadang kala terjadi salah komunikasi dan persepsi saat pertemuan secara virtual, ujicoba dilaksanakan pada saat masa pandemi, sehingga hanya dapat dilakukan di beberapa sekolah yg sudah siap tatap muka. Bahan yang disiapkan pada saat masa pandemi, diskusi hanya dapat dilakukan secara virtual. Kadang kala terjadi salah komunikasi dan persepsi saat pertemuan secara virtual.

Meskipun bahan acuan asesmen diagnostik (videografis, modul, dan buku saku) sudah dipublikasikan melalui Webinar atau melalui laman resmi Kementerian, namun masih belum keseluruhan pendidik maupun stakeholder di bidang pendidikan mengetahui informasi dari bahan acuan tersebut.

Modul asesmen diagnostik di awal pembelajaran yang dikembangkan terbatas mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia pada kelas tertentu di setiap jenjang pendidikan. Guru mata pelajaran lain agak kesulitan menyusun instrumen asesmen diagnosis walau menjadikan modul yang tersedia sebagai sumber inspirasi. Soal-soal yang tersedia di aplikasi AKSI Sekolah masih terbatas mengenai literasi dan numerasi tidak dikembangkan untuk setiap mata pelajaran, sehingga pendidik yang mengampu mata pelajaran masih kesulitan untuk mengadaptasi model asesmen diagnostik mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia ke dalam mata pelajaran lain.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Mengoptimalkan publikasi dan sosialisasi mengenai bahan acuan asesmen diagnostik yang telah dikembangkan agar seluruh pendidik dan stakeholder di bidang pendidikan dapat memanfaatkan bahan acuan tersebut. Melakukan desiminasi modul asesmen diagnostik secara keseluruhan mata pelajaran dan jenjang di satuan pendidikan. Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 5 indikator output, setiap target 1 indikator output setiap tahunnya, sehingga ditahun berikutnya tidak perlu dilanjutkan.

Asesmen diagnosis digunakan untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap siswa serta mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kompetensinya sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. *Output* utama dari program *Quick Wins* tersebut adalah termanfaatkannya hasil asesmen diagnosis oleh guru sebagai dasar desain pembelajaran pada sebagian besar satuan pendidikan. Perkembangan pelaksanaan program tersebut adalah:

- Terlaksananya sosialisasi asesmen diagnostik berkala awal pembelajaran (melalui webinar yang telah diikuti oleh 29.000 peserta).
- Modul asesmen diagnostik di awal pembelajaran telah dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi ribuan pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan.
- Buku saku diagnostik berkala telah dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi ribuan pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan.
- Videografis telah disimak oleh 16.000 penonton sebagai acuan untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran di satuan pendidikan.
- Aplikasi AKSI Sekolah telah digunakan oleh pendidikan untuk melakukan asesmen diagnostik di satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

Persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan bulan Oktober-November dengan target 271.523 satuan pendidikan

2. Reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah

Program Reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah, Progres capaian: dari target 4 indikator output, 2 indikator output realisasinya sudah terlaksana. Dokumen: Panduan Dan Mekanisme Otomasi Akreditasi, Hasil Akreditasi (belum penetapan): 100.748 - melalui visitasi: 11.431, - melalui otomasi: 89.317. Permasalahan dan kendala: Tidak ada anggaran yang alokasikan secara khusus, karena langkah ini masih dalam kegiatan rutin. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: Masih menunggu penetapan hasil akreditasi oleh BAN S/M.

Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2022, target yang ditetapkan Tahun 2020-2024 ada 4 indikator output, setiap target indikator output ditetapkan sesuai tahun pelaksanaannya, sehingga keberlanjutan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan.

Melalui reformasi sistem akreditasi Sekolah/Madrasah diharapkan pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah dapat dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel dan akurat. *Output* utama dari *Quick Wins* ini ada 3 yaitu:

1. Tata Kelola (proses bisnis) Akreditasi Sekolah/Madrasah yang lebih efisien dan efektif.
2. Penetapan instrumen akreditasi baru yang berbasis kinerja (*performance*).
3. Pengembangan *dashboard monitoring system*.

Menurut Ketua BAN S/M Toni Toharudin, reformasi akreditasi sekolah/madrasah merupakan program unggulan untuk akselerasi peningkatan kualitas pelayanan dan program. Dampak positif dari program tersebut adalah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sedangkan kekurangannya diperlukan proses adaptasi yang baik terhadap *stakeholders*, untuk itu diperlukan kolaborasi yang efektif dengan *stakeholders* terkait.

Salah satu penerima manfaat lainnya dari program ini adalah Amrullah Jasli Al-Haadi, menurutnya reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah perubahan instrumen Akreditasi menjadi IASP 2020 menjadi lebih menilai kinerja, dimana dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah, terdapat 4 penilaian yang menjadi penilaian utama dalam IASP 2020 yang meliputi mutu lulusan, mutu guru, mutu pembelajaran dan manajemen sekolah.

Dampak positif yang didapatkan sasaran sekolah madrasah lebih meningkat dan sebaliknya untuk hal yang tidak didapaknya adalah masih kurangnya pemahaman tentang IASO 2020, selain itu hambatan lainnya adalah tidak lengkapnya dokumen yang ada di sekolah sasaran. Harapan kedepan agar program ini lebih baik dan dari sisi web Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) agar lebih optimal dan sempurna.

3. Rumah Peradaban

Program Rumah Peradaban, Progres capaian: dari target 3 indikator output, 3 indikator output realisasinya sudah melebihi target. Telah dibuat 5 Judul Buku Pengayaan dalam program 5 Rumah Peradaban, telah dibuat dan terdistribusi 5 Model Alat Peraga Pendidikan sebanyak 94 buah, Penerima manfaat Rumah Peradaban sebanyak 884 orang yang terdiri atas Murid dan Guru Sekolah. Permasalahan dan kendala: pembuatan buku terlambat karena bahan dari penulis (peneliti) yang minim. Proses penulisan naskah yang memakan waktu lama oleh penulis buku.

Sementara jika memakai pihak ketiga biaya akan membengkak, Alat peraga pendidikan dirancang model cetakan replika 3 dimensi yang diperkecil skalanya. Penyedia layanan mesin 3D printing masih jarang tersedia dan memakan waktu lama, peserta yang hadir melebihi daftar kuota pulsa pengganti saat sosialisasi. Peserta belum termasuk di dalam pengunjung virtual situs yang tidak dilengkapi daftar tamu. Jika dilengkapi daftar tamu akan memperlama proses masuk ke laman, sehingga dinilai mengurangi kenyamanan pengunjung laman.

Promosi masih kurang karena tidak dianggarkan. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan: menggandeng pihak ketiga penulis populer untuk menjadi editor dari buku pengayaan. Namun dibutuhkan dana yang mencukupi agar hal tersebut terlaksana.

Berinovasi dalam alat peraga pendidikan yang bersifat maya atau virtual sehingga tidak membutuhkan waktu untuk penyetakan fisik, namun masih menampilkan citra 3 dimensi. Membuat acara launching non-budget, sebagai promosi kegiatan, mengundang media massa agar produk layanan tur virtual arkeologi dapat diketahui orang banyak. Berdasarkan target yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor: 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2022. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1.	Buku Terdistribusi	500 Peserta	593 Peserta	118,60%	209.200.000	203.417.050	97,24%
2.	Alat Peraga Terdistribusi	50 Alat Peraga	94 Model Alat Peraga	188,00%	407.100.000	400.722.765	98,43%
3.	Jumlah Peserta	500	884	176,8%	1.142.295.000	1.104.071.256	96,65%

Dengan adanya rumah peradaban, pelaku pendidikan, peserta didik dapat memperoleh akses informasi kesejarahan, masyarakat mengapresiasi peninggalan arkeologi dan informasi kesejarahan, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari penelitian arkeologi. Terdapat 3 output utama *Quick Wins* rumah peradaban yaitu destinasi pendidikan, alat peraga pendidikan, dan buku pengayaan. Capaian pelaksanaan program hingga triwulan 4 adalah sebagai berikut:

- Jumlah peserta sosialisasi daring dan tur *virtual* telah terlaksana sebanyak 300 peserta dari target 500 peserta dan 3 situs *virtual*. Kendala pada koordinasi lintas instansi untuk melibatkan siswa-guru SMA harus melalui pemerintah provinsi. Rekomendasi tindak lanjut rumah peradaban di kabupaten yang dekat dengan ibu kota provinsi dapat melibatkan SMA.
- Sebanyak 3 model alat peraga dan 1 paket animasi telah terdistribusi. Kendala pada keterlambatan pembuatan alat peraga dan distribusi alat peraga pendidikan harus dibantu pemda sehingga tindak lanjutnya adalah dilakukan koordinasi yang lebih intensif.

Terdapat 3 judul buku pengayaan dan 1440 buku pengayaan terdistribusikan. Kendala pada distribusi di daerah dibantu pemda sehingga tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif.

Dari sisi penerima manfaat menurut Nurrahmah dari SMK 25 Jakarta, rumah peradaban merupakan sarana edukasi dan pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya masa lampau dalam upaya melekat budaya, pencerdasan bangsa, penumbuhan



semangat kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan budaya yang berkepribadian. Dampak positif yang didapatkan adalah dapat memperkaya materi pelajaran sejarah yang tidak ada di buku namun bisa didapatkan di kegiatan rumah peradaban. Hambatan yang dirasakan belum semua sekolah disertakan dalam program ini, sehingga harapan kedepannya semakin banyak sekolah yang mendapati program rumah peradaban.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1. UKBI Adaptif

Program UKBI Adaptif Progres capaian: dari target 1 indikator output, 1 indikator output realisasi nya sudah 77,75%. saat ini pelaksanaan pengujian UKBI sudah dilakukan masif. Pengujian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan peserta yang mengikuti terdiri atas siswa, mahasiswa, WNA, dosen, guru, wartawan, dan lain-lain. ujian kemahiran berbahasa Indonesia untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Indonesia seseorang.

Permasalahan dan Kendala: Peserta belum terbiasa menggunakan aplikasi UKBI adaptif merdeka. Output utama dari program *Quick Wins* ini adalah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa. Hingga triwulan 4 pelaksanaan pengujian UKBI sudah dilakukan masif. Pengujian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan peserta yang mengikuti terdiri atas siswa, mahasiswa, WNA, dosen, guru, wartawan, dan lain-lain. Rekomendasi tindak lanjutnya admin membantu melakukan *reset* akun UKBI peserta yang salah memasukkan alamat posel agar dapat mendaftar ulang dengan data yang sesuai. Anggota KKLP UKBI diberikan bimtek layanan dan akun penilai agar jawaban seksi menulis dan berbicara dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. Capaian pelaksanaan masing-masing indikator output terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Output		Volume			Anggaran		
		Target Tahun 2021	Realisasi	% Realisasi	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa							
1.	Pelaksanaan pengujian secara massif	217.000 orang	161.154 Orang	77,64%	8.672.882.000	6.734.165.755	77,75%

Salah satu penerima manfaat dari UKBI Adaptif adalah Bintang Alvita Wahyuningtyas yang bekerja sebagai Penerjemah Pemerintah. Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penerjemah mensyaratkan UKBI Adaptif di dalam salah satu tes Uji Kompetensi.

Kendalanya adalah peserta masih ada yang salah memasukkan alamat ponsel pada saat melakukan pendaftaran. Jumlah SDM penilai seksi menulis dan berbicara tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam melayani seksi menulis dan berbicara. Menurutnya program ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Indonesia seseorang. Pendaftarannya dan teknis pelaksanaan mudah, jenis tes bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan hasil tes cepat keluar. Melalui program ini penerima manfaat dapat memiliki ukuran tentang tingkat kemahiran bahasa Indonesia.



Program ini dapat dipublikasikan lebih luas lagi sehingga gaungnya lebih besar serta dapat meningkatkan kemampuan literasi, kemampuan berkomunikasi, kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan semuanya akan mengarah ke memperkuat bangsa. Seperti yang diketahui uji kemahiran bahasa lain misalnya *TOEFL* telah menjadi industri yang sangat besar gaungnya, bahkan di luar negara pembuatnya, oleh karena itu UKBI Adaptif bisa lebih dieksplorasi.

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi Tindaklanjut

A. Kesimpulan

Gambaran hasil pelaksanaan Program *Quick Wins* Kemendikbudristek s.d. triwulan IV TA 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Program *Quick Wins* yang dilakukan Kemendikbudristek telah berdampak pada percepatan capaian target prioritas dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan program, kegiatan prioritas khususnya pada Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Percepatan pelaksanaan Program *Quick Wins* juga terjadi pada aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan terutama pihak eksternal dan internal Kemendikbudristek serta Pemerintah Daerah.
- b. Pada program *Quick Wins Mandatory* penyederhanaan organisasi Kemendikbudristek menjadi 2 level birokrasi saja, sehingga terdapat 2 target di tahun 2021 yang harus dilaksanakan. 1 target terkait penataan organisasi PTN agar menjadi lebih sederhana tanpa struktural eselon III dan IV baru mencapai 29,46% dari jumlah keseluruhan PTN, karena belum ditetapkannya pedoman organisasi PTN. Sedangkan pada target kegiatan pengalihan eks eselon III dan IV pada PTN dan Satuan Kerja menjadi jafung madya dan muda yang meliputi usulan baru dan penyesuaian. Usulan telah disampaikan ke KemenPAN RB dan menunggu persetujuan hingga diterbitkannya rekomendasi dan SK.
- c. Pada program *Quick Wins* mandiri unit eselon 1, terdapat 21 *Quick Wins* dan output utama dengan jumlah target indikator output di tahun 2021 sebanyak 59. Di triwulan 4 sebagian besar indikator output *Quick Wins* telah mencapai target yaitu sebanyak 72,88% (43 indikator output), dan 27,12% (16 indikator output) tidak mencapai target, dengan kendala permasalahan sebagai berikut:
 - Pengintegrasian satu data pendidikan dan kebudayaan terkendala pada sarana dan prasarana serta proses pembelajaran dalam penyamaan kode referensi dan struktur database, keterbatasan sistem dan data dari dapobud dan dapubas yang belum dapat memenuhi seluruh entitas data, serta belum adanya regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan data di lingkungan Pusdatin maupun di Ditjen Kebudayaan dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
 - Guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan *platform toolkit* pembelajaran (Platform Kurikulum) baru mencapai 92% karena belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana TIK, tidak meratanya kompetensi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital ke dalam pedagogis, serta sulitnya perizinan produksi yang mendukung Program Belajar dari Rumah (BDR) di masa PSBB.
 - Sosialisasi proses bisnis pemberkasan Arsip melalui SPAD kepada pengguna di Satker baru mencapai 74% karena pembinaan secara daring akibat pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal, serta berdasarkan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 dijelaskan bahwa pembinaan PTN tidak berada di bawah koordinasi Kemendikbud.
 - Penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak baru mencapai 89,25% dari target yang ditetapkan karena terdapat sekolah yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sehingga terjadi beberapa kali perubahan SK. Sedangkan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak baru

mencapai 89,25% dari target yang ditetapkan karena sekolah belum memahami bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar, dan beberapa sekolah mengalami kesulitan terkait sarana dan prasarana (listrik, dan akses internet).

- Output yang tersedia tidak sesuai dengan target *Quick Win*, seperti jumlah prodi yang mendapatkan pembinaan baru mencapai 79,18% karena output yang tersedia di tidak sesuai dengan target *Quick Win*, serta jumlah mahasiswa yang ikut micro credentials melalui Bangkit baru mencapai 85,74% karena target tidak sesuai dengan perencanaan Tim Bangkit.
- SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Hospitality baru mencapai 99%. Pembangunan fisik berupa Ruang Praktik sudah hampir selesai dilaksanakan, pengadaan peralatan praktik sedang proses penyelesaian serta pelaksanaan pendampingan oleh Perguruan Tinggi Vokasi.
- SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Kerjasama Luar Negeri, capaian 87,5%. Pengadaan peralatan praktik dengan mitra DUDI Schneider sedang proses penyelesaian serta pelaksanaan pendampingan oleh Perguruan Tinggi Vokasi.
- Kebijakan refocussing anggaran sehingga penguatan infrastruktur Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Internal Berbasis TIK yang handal serta pengembangan aplikasi belum tidak terlaksana.
- Pelaksanaan pengujian instrumen uji kemahiran berbahasa secara massif baru mencapai 77,64%, terkendala pada peserta belum terbiasa menggunakan aplikasi UKBI adaptif merdeka, keterbatasan jaringan internet di beberapa tempat menjadi kendala peserta, terutama dalam pengerjaan Seksi I, tidak semua peserta mengakses seri pelatihan sehingga kurang memahami bentuk soal UKBI, kesungguhan peserta uji dalam mengerjakan, dan perangkat pengujian peserta belum seluruhnya memadai, ada peserta yang melaksanakan UKBI menggunakan gadget.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Program *Quick Wins* tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

a. *Quick Wins Mandatory*

Sesuai dengan arahan Presiden dalam pidato pelantikannya terkait perampingan pejabat eselon pada Kementerian/Lembaga (K/L), Kemendikbudristek segera menindaklanjuti dengan: “Penyederhanaan Organisasi Kemendikbud menjadi hanya dua level birokrasi”. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah penguatan koordinasi dengan Kemenpan dan RB untuk mempercepat pembahasan dan penetapan pendataan organisasi PTN, serta mempercepat penerbitan rekomendasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai usulan.

b. *Quick Wins Mandiri*

Sekretaris Jenderal, yang menyelenggarakan program: “Platform Digital Pendidikan Nasional Tahun 2021, Otomatisasi Manajemen Perkantoran Tahun 2021, Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Pendidikan (Ekspansi SIPLah) Tahun 2021, dan Layanan Pembiayaan Pendidikan Satu Pintu Tahun 2021”, rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah optimalisasi proses integrasi data ditingkat internal dan eksternal, mempercepat proses finalisasi regulasi satu data dikbud, pengenalan awal penggunaan platform LMS (*Learning*

Management System) bagi guru penggerak/komunitas, sosialisasi proses bisnis pemberkasan Arsip melalui SPAD kepada pengguna PTN, serta melakukan *back up* pemeriksaan untuk pengembangan sistem informasi terintegrasi layanan pembiayaan pendidikan fase 2.

Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, yang menyelenggarakan program: “Sekolah Penggerak”, rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah mengoptimalkan penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak melalui internalisasi program sekolah penggerak kepada kepala sekolah pengganti yang telah di training oleh pelatih ahli, serta melakukan kemitraan dengan lintas kementerian terkait (Kemendesa, Kominfo, Kemdagri) serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kesenjangan digital.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang menyelenggarakan program: “Kampus Merdeka (Penerapan Pelaksanaan Sebagian Kurikulum di Luar Prodi dan Perguruan Tinggi), Kedaireka Kampus Merdeka, dan Pengembangan Talenta Digital”, rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah penyesuaian jumlah output dengan target *Quick Win* khususnya untuk indikator output jumlah prodi yang mendapatkan pembinaan dan indikator output meningkatkan jumlah mahasiswa yang ikut micro credentials.

Inspektorat Jenderal, yang menyelenggarakan program: “Pengawasan Berbasis TIK”, rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah melaksanakan program lanjutan pengembangan aplikasi pada tahun 2022, serta menggunakan hasil analisis/rekomendasi Kominfo untuk tidak melakukan pembelian infrastruktur tetapi cukup menggunakan infrastruktur Pusat Data Nasional.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang menyelenggarakan program: “UKBI Adaptif dan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan”. Rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengujian instrumen uji kemahiran berbahasa secara massif melalui program pra pengujian berupa pelatihan kemahiran berbahasa, membuat simulasi UKBI Adaptif merdeka, serta memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang Implentasi standar kemahiran dalam Permendikbud 70 Tahun 2016.

Menindaklanjuti adanya beberapa program *Quick Wins* Kemendikbudristek tahun 2021 yang tidak sesuai dan tidak bisa dilanjutkan di tahun 2022 karena adanya kebijakan perubahan struktur organisasi Kemendikbudristek, maka perlu diusulkan untuk dilakukan penyesuaian dan penetapan program *Quick Wins* 2022 - 2024.

Mengingat penetapan program *Quick Wins* Kemendikbudristek 2020 – 2024 tersebut tertuang dalam Kepmendikbud No.1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 maka perlu diusulkan perubahan atas Kepmendikbud No.1227/M/2020 tersebut.



**BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**Gedung C, Lt. 6 dan 7
JL. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270**